



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 111, Oktober 2018



Melawat ke Yordania, Agus Widjojo Tandatangani Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan RJNDC (hal. 11)

Kuliah Umum H.E. Kim Chang-Beom di Lemhannas RI.....	2	Gubernur Lemhannas RI Beri Pembekalan Kepada Para Pengusaha Muda.....	7
Kunjungan para Ketua Umum OKP ke Lemhannas RI.....	3	Agus Widjojo Lantik sejumlah Pejabat Lemhannas RI.....	8
NDC of Bangladesh Kunjungi Lemhannas RI.....	4	Jelang <i>Jakarta Geopolitical Forum</i> , Lemhannas RI Gelar Forkom Pimpinan Lemhannas RI dengan Media Massa.....	9
Lemhannas RI Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila.....	4	Sinergi Lemhannas RI dengan Kemendagri RI, Komnas Perempuan dan Ikatan Notaris.....	10
Sosialisasi Penyelesaian Tagihan Lemhannas RI.....	5	Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 58 Lemhannas RI.....	10
<i>Training Field Coaches Program</i> Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia.....	5	Melawat ke Yordania, Agus Widjojo Tandatangani Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan RJNDC.....	11
Pembukaan Taplai HIPMI Angkatan V.....	6		

Kuliah Umum H.E. Kim Chang-Beom di Lemhannas RI



Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, H.E. Kim Chang-Beom mengunjungi Lemhannas RI untuk memberikan Kuliah Umum yang diikuti oleh sejumlah pejabat Lemhannas RI, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional pada Senin (19/9) di Ruang Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI.

Kim Chang-Beom, sebelum memberikan kuliah umumnya, diterima langsung Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo untuk melakukan *courtesy call* di Ruang Tamu Pimpinan di Gd. Trigatra Lt.1 Lemhannas RI.

Pada kuliah umum yang mengangkat topik “Hubungan Bilateral Indonesia-Korea Selatan dan Inter Korea Summit”, Kim Chang-Beom lebih membahas mengenai “*Peace, A New Future: Inter-Korean Summit and Next?*”.

Kim Chang-Beom menjelaskan pada kuliah umumnya terkait kemitraan strategis yang dibangun oleh Indonesia dan Korea Selatan. Ia menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan membawa misi penguatan kerjasama ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Menurut Kim Chang-Beom, Korea Selatan dan Indonesia telah meningkatkan level kerjasama menjadi *Special Strategic Partnership*. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan satu-satunya di Kawasan ASEAN yang memiliki kerjasama kemitraan strategis dengan Korea Selatan.

Selain itu juga, Kim Chang-Beom juga menjelaskan bahwa volume perdagangan dengan Indonesia juga terus meningkat. “keuntungan yang didapat mencapai 9,8 Milliar US dollar sampai kuartal pertama 2018, dan ditargetkan akan mencapai 30 Milliar US dollar di tahun 2022,” jelas Kim Chang-Beom.

Indonesia dan Korea Selatan, tambah Kim Chang-Beom, juga telah menyepakati kerjasama dalam industri pertahanan yakni dalam pembuatan kapal selam oleh PT. PAL dan DSME Korea. Selain itu, kerjasama pertahanan tersebut dapat terus berlanjut seperti kerjasama dalam pembuatan pesawat Jet.

Selain menjelaskan mengenai peningkatan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, Kim Chang-Beom juga menjelaskan tentang kesepakatan perdamaian dan keamanan Korea Selatan – Korea Utara yang dijadikan sebagai sebuah budaya dan sejarah baru bagi bangsa Korea. Ia juga menegaskan bahwa kedua negara ini serius untuk menjalankan program denuklirisasi terutama Korea Utara.



Kunjungan para Ketua Umum OKP ke Lemhannas RI

Mewakili Gubernur Lemhannas RI, Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI, Brigadir Jenderal TNI Mindarto menerima kunjungan para Ketua Umum dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) pada Jumat (21/9) di Ruang Nusantara II, Gd. Trigatra, Lemhannas RI.

Kunjungan 16 ketua OKP yang bernaung dibawah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk beraudiensi yang bertujuan meminta saran dan masukan dari Lemhannas RI terkait dengan kegiatan Silaturahmi Nasional dan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Silatnas dan Rapimpurnas) jelang Kongres KNPI ke XV pada bulan Oktober 2018.

Aznil Kelana yang merupakan Sekretaris *Steering Committee* Kongres KNPI ke XV dan Ketua Pemuda Bulan Bintang, mengungkapkan bahwa dalam perkembangan dinamika yang terjadi dalam tubuh KNPI perlu adanya kerjasama dalam bidang pemantapan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan kepada para ketua umum OKP. "Kami perlu wawasan kebangsaan sehingga kami tidak mudah terpecah belah," ungkap Aznil Kelana.

Sementara, Bintang Wahyu Saputra yang merupakan Ketua Penyelenggara Silatnas dan Rapimpurnas, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Silatnas dan Rapimpurnas harus disinergikan dengan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan agar para pemuda tidak mudah terpecah belah.

"Kami meminta dukungan kepada Lemhannas RI, untuk memberikan program nilai-nilai kebangsaan agar para pemuda bisa bersatu dan menjaga persatuan, sehingga tidak menyebabkan perpecahan." tukas Bintang Wahyu Saputra yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI).

Selain itu, para Ketua Umum OKP lainnya juga memberikan beberapa masukan dan saran yang senada terkait dengan dinamika menjelang kongres KNPI pada bulan Oktober mendatang.

Menanggapi positif hal tersebut, Mindarto menjelaskan bahwa Lemhannas RI memiliki tugas dan fungsi sesuai visi dan misi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Terkait hal tersebut, Mindarto juga akan menyampaikan niat baik kepada Gubernur Lemhannas RI dari para Ketua OKP dibawah naungan KNPI, untuk melaksanakan Kongres ke XV guna menetapkan kepemimpinan KNPI yang baru.

Mindarto juga menyampaikan apresiasinya atas kepedulian dari para pemuda yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa serta Pancasila. Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Biro Kerjasama Laksamana Pertama TNI Budi Setiawan, S.T.

NDC of Bangladesh Kunjungi Lemhannas RI

Kepala Biro Kerja Sama Laksma TNI Budi Setiawan, S.T. menyambut kedatangan Siswa *National Defence College (NDC) of Bangladesh* yang melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Senin (24/9), di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt.3, Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, para siswa NDC berkesempatan melakukan diskusi dengan para pejabat Lemhannas RI. Diskusi diawali dengan pemutaran video profil Lemhannas RI yang berisikan sejarah, visi, misi, fungsi, dan program pendidikan di Lemhannas RI. Kemudian diskusi dilanjutkan dengan sambutan dan paparan penerimaan peserta dan penjelasan mengenai terkait dengan registrasi peserta dari negara sahabat oleh Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl In DS., M.A., RCDS.

Lebih lanjut Rujito menjelaskan bahwa pendidikan yang dilakukan Lemhannas RI juga bermaksud untuk mempererat hubungan dengan negara sahabat dan menyiapkan pemimpin masa depan. Beberapa negara yang telah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI adalah negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Negara Pasifik, dan Australia.



Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta diskusi dan diakhiri dengan foto bersama. Hadir dalam diskusi tersebut adalah H. E. Major General Azmal Kabir, OSP, psc selaku Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Mayjen Safiuddin Ahmad Kepala Kedutaan Pendidikan Bangladesh, Kepala Biro Humas, sejumlah Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Pengajar Lemhannas RI.

Lemhannas RI Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila



Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. selaku Inspektur Upacara, memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Senin (1/10) di Lapangan Tengah Lemhannas RI.

Dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut dilakukan pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh

peserta upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kemudian juga dilaksanakan pembacaan naskah Pembukaan UUD 1945, pembacaan naskah Ikrar dan doa oleh petugas upacara.

Upacara Peringatan Hari kesaktian Pancasila yang berlangsung khidmat tersebut, dihadiri oleh seluruh pejabat Lemhannas RI, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, Peserta PPRA 57 dan 58 serta seluruh anggota Lemhannas RI.

Sosialisasi Penyelesaian Tagihan Lemhannas RI

“**V**erifikasi pertanggungjawaban anggaran adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kepala Bagian Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan (Renku) Settama Lemhannas RI Kolonel Cku Andi Tjarwandi, S.E. ketika mewakili Kepala Biro Renku Settama Lemhannas RI dalam membuka acara Sosialisasi Penyelesaian Tagihan Lemhannas RI di BKT Hotel and Resort, Bogor, Kamis (27/09).

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya memperlancar proses penyelesaian tagihan di lingkungan Lemhannas RI. Penyelesaian tagihan negara merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh para pejabat perbendaharaan negara.

Dalam pelaksanaan APBN, para pejabat perbendaharaan tersebut tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya petugas yang membantu penyelesaian administrasi mulai dari penyusunan pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pengajuan tagihan, dan seterusnya sampai dengan pencairan dana. Oleh karena itu, sosialisasi ini mengundang 46 peserta yang merupakan petugas pengelola keuangan di lingkungan Lemhannas RI.

Kepala KPPN Jakarta VI Wahyu Prihantoro hadir sebagai narasumber menjelaskan kelengkapan syarat-syarat penyelesaian tagihan sesuai PMK 190 dan PMK terkait lainnya. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai mekanisme Rencana Penarikan Dana (RPD) lembar III DIPA, RPD bulanan, harian, insidental, serta penolakan dan pengembalian tagihan oleh Dimas Wijaya dari KPPN Jakarta VI.



Training Field Coaches Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia

Pada 1 s.d. 3 Oktober 2018 telah diselenggarakan *Training Field Coaches* (TFC) Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia di Hotel Mercure Sabang, Jakarta (10/3).

TFC merupakan rangkaian dari *Making Indonesia 4.0* yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI dan *United in Diversity* (UID).

Sementara peserta yang mengikuti TFC tersebut, berasal dari tiga instansi yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Kemen Ristek Dikti RI, dan Lemhannas RI.

Frans, salah satu pemateri dari UID menjelaskan bahwa fokus kegiatan TFC ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai *Theory U* dan *System Thinking* untuk meningkatkan kapasitas pemimpin Indonesia.

Diharapkan dengan melatih para *trainer* dari tiga lembaga pendidikan pemerintahan yaitu LAN RI, Kemenristek Dikti RI, dan Lemhannas RI, akan melahirkan *trainer* yang mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai *Theory U* dan *System Thinking* kepada peserta didik.

“Pada 2019 nanti diharapkan ada pembangunan kapasitas pemimpin Indonesia, serta mulai ada sinergi untuk mencetak pemimpin Indonesia yang paham atas dinamika global,” kata Frans melanjutkan.

Terdapat tiga materi utama yang diberikan pada TFC ini, pertama adalah pemahaman mengenai *sensing* untuk meningkatkan sensitivitas kepemimpinan melalui sistem SPT (*social, presence, theater*). Kedua, mental model yaitu bagaimana dengan proses *Theory U* membangun sistem untuk melihat dirinya sendiri dalam lingkungan sosial. Ketiga, program literasi terhadap data, teknologi/digital, dan manusia.



Pembukaan Taplai HIPMI Angkatan V

Lemhannas RI kembali menggelar Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo pada Senin (8/10) di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra, Lt. III, Lemhannas RI.

Ketua HIPMI, Bahlil Lahadalia, mengatakan dalam sambutannya bahwa kesempatan yang diberikan kepada para anggota HIPMI untuk dapat mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan hingga angkatan ke-5 merupakan kesempatan yang berharga. Bahlil Lahadalia memandang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang berlangsung selama tujuh hari ini, sangat penting karena para pengusaha muda perlu dibekali dengan nasionalisme yang kuat dalam melakukan peran mereka di masyarakat.

Dalam upacara pembukaan tersebut, Agus Widjojo dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para peserta pemantapan. "Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Suatu kehormatan bagi Lemhannas RI dapat berbagi dan memberikan pencerahan kepada para peserta mengenai Nilai-Nilai Kebangsaan," ucap Agus Widjojo.

Agus Widjojo menuturkan bahwa perkembangan global karena persaingan antar negara termasuk di bidang ekonomi sedang terjadi. Hal tersebut seharusnya dihadapi bersama oleh segenap komponen bangsa, termasuk para anggota HIPMI yang merupakan pengusaha muda. Ditengah-tengah persaingan ekonomi tersebut, krisis nasionalisme di kalangan pemuda semakin memudar. Maka dari

itu, para generasi muda harus memiliki pemahaman yang mumpuni tentang nilai-nilai Kebangsaan yang dijiwai dengan semangat nasionalisme, tak terkecuali para anggota HIPMI.

"Sangat tepat bagi HIPMI mengikuti pemantapan ini agar nantinya para anggota HIPMI dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap nasib bangsa," jelas Agus Widjojo.

Turut hadir dalam upacara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang diikuti 75 peserta, yakni Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., dan sejumlah pejabat struktural lain serta para pejabat fungsional Lemhannas RI.



Sangat tepat bagi HIPMI mengikuti pemantapan ini agar nantinya para anggota HIPMI dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap nasib bangsa

*Gubernur Lemhannas RI
Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo*

Gubernur Lemhannas RI Beri Pembekalan Kepada Para Pengusaha Muda

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pembekalan kepada Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra, Lantai III, Lemhannas RI, Kamis (10/11). Pembekalan tersebut mengangkat tema “Konsensus Dasar Kebangsaan dalam Cakrawala Perjalanan Bangsa”.

Mengawali pembekalan, Agus widjojo mengatakan wawasan nusantara merupakan cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. “Semua cara pandang kita harus lah berwawasan nusantara. Semuanya satu,” tegas Agus Widjojo.

Ketahanan nasional, jelas Agus Widjojo, adalah suatu nilai kondisi merupakan keadaan dinamis bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. “Pada dasarnya ketahanan nasional adalah bagaimana sebuah benda apabila mendapatkan upaya perubahan bentuk nantinya dia akan kembali ke bentuk semula,” ujar Agus Widjojo.

“

Ketahanan nasional adalah suatu nilai kondisi merupakan keadaan dinamis bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

*Gubernur Lemhannas RI
Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo*

Terkait dengan kewaspadaan nasional, Agus Widjojo mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap semua bentuk tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang mengganggu ideologi bangsa.

Kemudian, Agus Widjojo menjabarkan mengenai gatra-gatra yang digunakan untuk mengetahui ketahanan nasional Indonesia. Gatra tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat dinamis dan statis. Gatra yang bersifat relatif statis, jelas Agus Widjojo, adalah gatra geografi, Sumber kekayaan alam, dan demografi yang disebut Trigatra. Sedangkan gatra yang bersifat relatif dinamis adalah idologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disebut dengan Pancagatra.

Pembekalan singkat tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta isu-isu kebangsaan terkini.



Agus Widjojo Lantik sejumlah Pejabat Lemhannas RI



"Pengisian dan pelepasan jabatan dilakukan melalui mekanisme dan pertimbangan berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja," ujar Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Pelantikan dan Pengangkatan serta Pelepasan Pejabat Lemhannas RI di Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Kamis (11/10).

Agus Widjojo mengatakan bahwa pelantikan dan pengangkatan pejabat dalam suatu organisasi tidak hanya merupakan kepercayaan dan kehormatan, namun juga merupakan amanah, tantangan dan ujian. "Kepada para pejabat, saya berpesan agar melaksanakan amanah ini secara sungguh-sungguh, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dengan melakukan yang terbaik bagi Lemhannas RI," pesan Agus Widjojo.

Sementara itu, Agus Widjojo menyampaikan bahwa pelepasan pejabat untuk dimutasi dari Lemhannas RI merupakan suatu kehormatan karena para pejabat tersebut telah mengabdikan diri dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh.

Berkaitan dengan mekanisme pengisian dan pelepasan jabatan di Lemhannas RI, Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI pada tahun 2018 ini telah melaksanakan asesmen bagi pejabat Eselon IV dan hasil asesmen tersebut akan dijadikan

"*Kepada para pejabat, saya berpesan agar melaksanakan amanah ini secara sungguh-sungguh, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dengan melakukan yang terbaik bagi Lemhannas RI*

*Gubernur Lemhannas RI
Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo*

bahan pertimbangan dalam mutasi jabatan dan pengembangan karir pegawai. Selain itu, Lemhannas RI juga sedang melaksanakan pengadaan calon pegawai negeri sipil secara nasional, serta seleksi terbuka pada jabatan Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI.

"Hal ini merupakan penerapan dari sistem merit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana kebijakan dan manajemen sdm dilakukan dengan kompetitif, bebas dari intervensi dan berkeadilan," jelas Agus Widjojo.

Menutup sambutannya, Agus Widjojo mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap para pejabat yang dilepas.



Jelang Jakarta Geopolitical Forum, Lemhannas RI Gelar Forkom Pimpinan Lemhannas RI dengan Media Massa

Jelang Jakarta Geopolitical Forum tahun 2018, yang mengangkat tema “*Mapping The Future of Geopolitics*” yang akan digelar pada 24 Oktober 2018, Lemhannas RI menggelar Forum Komunikasi dengan Pemimpin Media Massa di Anjungan Gedung Trigatra Lt. 3 Lemhannas RI (15/10).

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo saat membuka kegiatan tersebut menyebutkan, bahwa penyelenggaraan JGF merupakan bentuk eksistensi Lemhannas RI di kancah global, sebagai salah satu lembaga di Indonesia yang mempelajari ilmu geopolitik.

“Diharapkan hasil *Jakarta Geopolitical Forum* tahun 2018, dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dinamika geopolitik, baik di level nasional, regional dan global yang terjadi dan tentu saja akan memberikan pengaruh kepada pembangunan nasional,” kata Agus Widjojo.

Selain itu, Prof. Dadan Umar Daihani selaku Ketua *Steering Committee Jakarta Geopolitical Forum 2018* menyebutkan bahwa terdapat tiga isu utama yang akan diangkat dalam JGF 2018, yaitu *Trade War Issues*, *OBOR/BRI Issues*, dan *Indo Pacific Issues*.

“Dengan diselenggarakannya JGF, diharapkan dapat memetakan geopolitik masa depan, di dalam situasi yang tidak terprediksi, yang harus kita lihat apa yang akan terjadi dan kita harus ada dimana,” kata Prof. Dadan.

Tiga isu tersebut akan menjadi fokus dan akan melihat bagaimana dampaknya bagi dunia. JGF akan menjadi forum bagi pakar, ahli, dan akademisi geopolitik dunia, untuk menjadi forum diskusi, dan

menjadi masukan bagi perkembangan ketahanan Indonesia, baik dalam level nasional, regional, maupun internasional. Langkah ini menjadi langkah untuk memberikan rekomendasi bagi Indonesia di tengah ketidakpastian dunia, serta menjadi bahan diskusi bagi *Scenario Indonesia 2045*.

Selain mengangkat JGF, Agus Widjojo juga menyinggung mengenai *hoaks* dan *post truth* di tengah berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan informasi saat ini dan dinamika sosial politik di Indonesia. Menurutnya, tidak semua informasi yang didapatkan memiliki nilai kebenaran faktual. Banyak informasi yang masih diragukan kebenarannya. Ini merupakan satu ciri dari fenomena era *post truth* yang cenderung menonjolkan opini dan tafsir terhadap suatu fakta yang ada.

Sementara pemapar lain, Kombes Pol Drs. Raden Martono Sindhu, M.Si. Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bidang Ilpengtek Lemhannas RI mengatakan, saat ini masyarakat kerap mengungkapkan suatu hal yang disebut *hoaks* dan *post truth*, meski tanpa data. Hal tersebut diyakini sebagai sebuah kebenaran.

“Dan apabila ini kita biarkan satu kebohongan yang secara terus-menerus akan membangun persepsi kolektif dan secara bertahap membentuk sifat kolektif dan terjadi kerusakan masal bahkan sampai perang ini diakibatkan *hoaks* dan *post truth*,” jelas Sindhu.

Turut hadir dalam forum tersebut, Direktur Utama LPPTVRI Helmy Yahya, Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari, perwakilan pemimpin redaksi media massa, dan wartawan media massa serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI.

Sinergi Lemhannas RI dengan Kemendagri RI, Komnas Perempuan dan Ikatan Notaris

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjoe Kumolo, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana R.M., S.H., dan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari di Ruang Nusantara Gedung Trigatra Lemhannas RI, pada Senin (15/10).

Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan ketiga institusi tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli/pakar/akademisi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, tukar menukar informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional, pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak sesuai perundangan yang berlaku.

"Secara khusus, dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sepaham dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian, tukar menukar tenaga ahli pengkaji, informasi, dan dukungan teknologi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional", ujar Agus Widjojo.

Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komnas Perempuan merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman sebelumnya yang telah habis masa berlakunya. Sedangkan, Nota Kesepahaman dengan Ikatan Notaris Indonesia merupakan wujud komitmen bersama untuk menjalin kerja sama. Lemhannas RI dan Komnas Perempuan menyepakati tentang penguatan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional perempuan pada aspek pendidikan, pengkajian strategik, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Komitmen dan sinergi Lemhannas RI bersama ketiga instansi tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.



Penataran Istri/Suami PPRA 58 Lemhannas RI

Lemhannas RI mengadakan Penataran bagi para Istri/Suami peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 58 yang diselenggarakan selama enam hari sejak tanggal 19 Oktober dan berakhir pada tanggal 26 Oktober mendatang di Auditorium Gajah Mada.

Usai membuka Penataran Istri/Suami, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. memberikan *ice breaking* dan sambutan selamat datang kepada para suami/istri. Bagus Puruhito mengatakan tujuan penataran adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta jangkauan pandang para istri/suami sejalan dengan makin berkembangnya wawasan dan pengetahuan serta cakrawala peserta PPRA 58.

Keberhasilan para peserta Lemhannas RI dalam meniti karir dan mengemban tugas negara dari waktu ke waktu nantinya tidak mungkin terjadi tanpa peran istri/suami sebagai pendamping. Oleh karena itu, sepatutnya keharmonisan suami istri terus dijaga, melalui pemeliharaan, wawasan, moral, etika sehingga sesuai dengan pepatah yaitu di balik kesuksesan suami ada istri yang kuat dan tangguh.

Melalui penataran ini, 92 istri dan 6 orang suami peserta PPRA 58 yang merupakan pendamping kader pemimpin nasional dapat memahami lebih dalam mengenai makna moral dan etika kebangsaan yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kehidupan sehari-hari. "Hakekat dari penataran ini adalah untuk menyiapkan para istri/suami dalam membantu suami/istri dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan berwarga dan bermasyarakat," tegas Bagus Puruhito.

Bagus mengharapkan penataran yang singkat tersebut, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Pandai-pandai menyerap ilmu pengetahuan dan pengalaman di lingkungan Lemhannas RI maupun antara suami/istri sendiri karena hal itu sangat penting dalam menyongsong dan menghadapi tantangan tugas di kehidupan yang akan datang." ucap Bagus.

Melawat ke Yordania, Agus Widjojo Tandatangani Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan RJNDC

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melakukan lawatan ke Yordania dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan *The Royal Jordanian National Defence College* (RJNDC) pada Rabu (17/10). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo dan Brigadir Jenderal Abdullah S. AlShdaift.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bahwa Lemhannas RI adalah lembaga pemerintah terkemuka yang sekaligus berperan sebagai lembaga *Think Tank* pemerintah. Lemhannas RI, jelas Agus Widjojo, telah menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional sejak 1965. Lemhannas hingga saat ini terus berusaha untuk menjadi lembaga pendidikan tingkat nasional yang berkelas dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Agus Widjojo mengatakan bahwa sejak tahun 2009, Lemhannas RI menerima peserta pendidikan dari negara-negara sahabat dan telah menerima sembilan peserta dari Yordania untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler di Lemhannas RI.

Mengenai hubungan antara Indonesia dengan Yordania, Agus Widjojo menjelaskan bahwa kedua negara telah menjalin kerja sama sejak tahun 1950. "Indonesia dan Yordania telah menjalin hubungan kerja sama sejak tahun 1950 dan sejak saat itu pula telah banyak kerja sama yang dilakukan di berbagai bidang," jelas Agus Widjojo.

Agus Widjojo berharap dengan lawatan singkat ini, Lemhannas dan RJNDC dapat bekerja sama terutama di bidang-bidang yang telah di sepakati dalam Nota Kesepahaman seperti kajian bersama, pertukaran staf ahli, seminar bersama, serta kerja sama lain yang tertulis dalam Nota Kesepahaman tersebut.

Sebelum menutup sambutannya, Agus Widjojo berharap penandatanganan Nota Kesepahaman ini dapat menjadi tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan. "Saya berharap melalui Nota Kesepahaman ini, kita dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar kedua institusi," pungkas Agus Widjojo.





Tim **Redaksi** newsletter Lemhannas RI

Pengarah: **M. Iriawan** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Mindarto**

Redaktur Pelaksana: **Edy Tardjono** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Bambang Iman Aryanto** Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto**

Sekretariat: **Soeparmo, Gatot, Ayu Novitasari** Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI,**
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110 Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>